



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2027



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD	
2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	7
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	9
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	10
 BAB III TUJUAN, SASARAN, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	12
3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	12
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2027	13
 BAB IV PENUTUP	
 LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT serta atas rahmat dan karunia-NYA, Rencana Kerja Tahun 2027 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan selesai disusun.

Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang terarah, berdayaguna dan berhasil guna harus diawali dengan perencanaan yang matang dan dituangkan dalam bentuk alokasi dana serta sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang profesional.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Rencana Kerja tahun 2025 untuk dijadikan acuan/pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diharapkan. Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud, perlu dukungan semua pihak termasuk aparat pengelola Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, dalam upaya mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Demikianlah Kata Pengantar yang dapat kami sampaikan dan kami sangat mengharapkan masukan-masukan dari berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan Rencana Kerja tahun 2027.

Palembang, Februari 2026

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Drs. H. Arinarsa Jaya Surya
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 197106031991011002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana dipahami bahwa dalam pembangunan dibutuhkan perencanaan yang merupakan rangkaian proses untuk menentukan tindakan yang tepat dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam bagian perencanaan tersebut akan lahir kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dengan prinsip untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat luas. Namun demikian, harus dipahami pula meskipun perencanaan yang disusun sudah melalui proses yang panjang dan dianggap matang, harus pula diberi peluang untuk tanggap terhadap perubahan mengingat berbagai dinamika pembangunan. Dinamika yang dihadapi pemerintah dalam perencanaan pembangunan tidak hanya dalam lingkup birokrasi itu sendiri, tapi yang paling utama adalah dinamika yang terjadi di masyarakat baik itu masyarakat umum maupun masyarakat dunia usaha. Demikian dinamika politik, terutama di Indonesia dimana umumnya nuansa politik cukup kental berpengaruh dalam proses perencanaan pembangunan.

Perencanaan yang tanggap terhadap perubahan sebagaimana dijelaskan di atas juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan evaluasi pembangunan. Evaluasi pembangunan yang tidak hanya dilakukan pada akhir tahun pelaksanaan akan tetapi dilakukan secara berkala. Hal tersebut adalah bertujuan untuk menjaga pembangunan menuju pada arah yang tepat (*on track*), sehingga meskipun terjadi pergeseran kebijakan hanya berupa penajaman dan tidak mengubah tujuan akhir dari perencanaan.

Hal tersebut merupakan salah satu kewajiban pokok yang semata-mata menjadi fokus penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025, yang diantaranya dilakukan dengan penghematan/efisiensi beberapa fokus kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera

Selatan dengan tidak mengurangi target capaian RPJMD Provinsi Sumatera Selatan yang harus dipenuhi.

Kebutuhan akan perubahan untuk mengakomodir dinamika pembangunan di Sumatera Selatan tersebut harus dibarengi pula dengan kemampuan pendanaan yang berfungsi untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan yang dirasakan mendesak untuk dilaksanakan pada tahun berjalan. Selain itu bisa juga dilakukan dengan pergeseran beberapa program prioritas sehingga pembangunan bisa berjalan lebih baik lagi dengan hasil yang lebih optimal. Adapun hal yang menjadi pertimbangan perlunya dilakukan Perubahan APBD, antara lain keadaan yang menyebabkan perlunya pergeseran anggaran antar unit kegiatan dan antar jenis belanja serta adanya saldo anggaran lebih (SILPA) tahun sebelumnya yang harus dimanfaatkan dalam tahun berjalan.

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan RPJMD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) Tahun guna mengoperasionalkan SKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama satu tahun, sedangkan tujuannya adalah :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan untuk menunjang pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.
3. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra dan Renja OPD untuk menunjang pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Renja Perubahan OPD, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan.

- 1.1 Latar Belakang, memuat tentang Renja OPD, Proses Penyusunan Renja OPD, Keterkaitan antara Renja OPD dengan Dokumen OPD, Renstra OPD, dengan Renja.
- 1.2 Landasan Hukum, menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027.

- 1.3 Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja OPD.
- 1.4 Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

- 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.
- 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Berisikan uraian mengenai Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2027

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2027, Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan mempunyai sasaran Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama (Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas). Untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan ke dalam indikator kinerja yaitu Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD.

Target *penurunan potensi konflik* dicapai dengan kegiatan, Pembinaan dan Pembekalan Deteksi Dini Terhadap Ancaman Stabilitas Daerah, Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Sumatera Selatan, Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Berwawasan Kebangsaan melalui Pagelaran dan Pelaku Seni, Pembekalan Peningkatan Kesadaran Bela Negara, Pembinaan dan Pengimplementasian terhadap 4 Konsensus Dasar, Pembentukan Tenaga Penggerak Pembauran, kegiatan Pembekalan Peningkatan Pemahaman Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik, kegiatan Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Konflik Sosial, Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Selatan, Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Guna terwujudnya pelaksanaan tugas pokok tersebut, perlu didukung sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) sedangkan dengan adanya struktur organisasi yang baru Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan belum didukung sarana dan prasarana yang memadai yaitu masih terbatasnya ruang penyimpanan dokumen, belum adanya sarana prasarana pada ruang pertemuan, lingkungan/halaman kantor kurang representative, belum

layaknya tempat parkir karyawan, dan sarana prasarana ruang pelayanan kurang memadai.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan didukung sebanyak 46 orang.

a. Susunan Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan pangkat dan golongan ruang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Susunan Kepegawaian berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Juru/I (Orang)	0
2.	Pengatur/II (Orang)	4
3.	Penata/III (Orang)	17
4.	Pembina/IV (Orang)	9
5.	Ahli Pertama/IX	5
6.	Terampil/VII	7
7.	Pemula/V	4
TOTAL		46

b. Susunan Kepegawaian berdasarkan Jabatan

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Jabatan, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

Susunan Kepegawaian berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan/Struktural/Fungsional	Jumlah (Orang)
1.	Esselon II	1
2.	Esselon III	5
3.	Esselon IV	10
4.	Fungsional	56
TOTAL		72

- c. Susunan Kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan
Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan tingkat pendidikan, dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3

Susunan Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SD/SMP	2
2	SLTA	11
3.	S1/DIV	33
4.	S2	24
5.	S3	2
TOTAL		72

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Gubernur di Bidang Kesatuan Bangsa, Demokrasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, karena dalam membangun tentunya sangat diperlukan suatu situasi dan kondisi sosial politik yang kondusif, selain itu kesamaan pola pikir masyarakat yang bernilai kebangsaan yang kuat tentunya juga sangat diperlukan agar tercipta saling toleransi, menghargai dan penanaman nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Badan Kesbangpol merawat Kesatuan Bangsa melalui kepekaan dan cegah dini untuk membangun Demokrasi yang bermartabat dan elegan.

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang cukup luas akan munculnya realitas kehidupan Bangsa Indonesia, dewasa ini yang masih dalam situasi kritis multi dimensional, kritis moneter dan ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 telah berkembang menjadi krisis sosial dan krisis politik yang ditandai dengan terjadinya berbagai konflik horisontal maupun konflik vertikal yang perlu mendapat perhatian dalam aspek Kesbangpol.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol dan akar permasalahan pembangunan daerah yang secara umum dirasakan oleh masyarakat, maka permasalahan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan khususnya yang berkaitan dengan aspek Kesbangpol dapat diidentifikasi berdasarkan fakta atau kondisi aktual kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti :

1. Kecendrungan pergeseran dalam nilai-nilai budaya Indonesia sebagai Negara Timur yang mengarah kepada budaya yang tidak santun.
2. Keengganan dalam merefleksikan dan mengartikulasikan nilai-nilai luhur budaya dan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia.
3. Euforia demokrasi secara berlebihan.
4. Penguatan paham dan sikap anti pluralisme.
5. Kecendrungan mengembangkan perilaku menghujat antar sesama anak bangsa yang tidak sesuai lagi dengan norma-norma dan sendi-sendi kehidupan bangsa, dan hujatan tersebut khususnya diarahkan kepada pemimpin.
6. Banyaknya PNS terkait dengan masalah Hukum.
7. Kecendrungan euforia otonomi daerah menimbulkan daerah yang berlebih dan merasa paling berhak mengatur daerah tanpa memperhatikan aturan dan perundang-undangan.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKP

Dalam pemecahan masalah isu-isu strategis tersebut, rancangan awal terhadap kegiatan di Kesbangpol pada tahun 2027 terdiri dari 6 program dan 39 kegiatan yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari 7 Kegiatan;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang terdiri dari 1 Kegiatan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang terdiri dari 1 Kegiatan;

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang terdiri dari 1 Kegiatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang terdiri dari 1 Kegiatan;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang terdiri dari 1 Kegiatan;

RKPD tahun 2027 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2026.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dari RPJM Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, tergambar bahwa luasnya cakupan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol dan semua tupoksi tersebut mengarah kepada Meningkatnya Komitmen dan Dukungan Pemangku Kepentingan Terhadap Berjalannya Proses Demokratisasi dan dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Program Pembangunan daerah Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan beberapa indikator kinerja (*outcome*) :

1. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah;
2. Tingkat partisipasi pemilih dalam PILKADA;
3. Pemberdayaan dan mengoptimalkan forum kemitraan masyarakat serta Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP.

Adapun sasaran yang ingin di capai adalah, Meningkatnya Peran dan Fungsi Partai Politik, menguatnya peran masyarakat dalam kehidupan politik dan tumbuhnya pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang maju, sejahtera dan demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa dan etika politik menuju masyarakat berkualitas dan berbudaya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, merupakan dasar dan acuan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara terencana, terarah dan terkoordinasi. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima)

tahun kedepan pada hakekatnya merupakan pengembangan rencana strategis secara berkelanjutan.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Capaian					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Mempertahankan Stabilitas Sosial	1. Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat	1.1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Selatan	81,79	82,48	83,65	84,45	85,13	85,73
		2. Penguatan Ketentraman di Masyarakat	2.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,01	78,15	78,35	78,85	79,01	79,50
			2.2. Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2027

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dan operasional perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan Misi dan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan disusun berdasarkan kriteria akseptabilitas, fleksibilitas, terukur, pendorong kinerja, dan kesesuaian dengan visi dan misi agar mudah dipahami, guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Berdasarkan pendekatan diatas, maka tujuan jangka menengah pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Sumatera Selatan yang ingin diwujudkan adalah mewujudkan Terwujudnya Sumatera Selatan yang Aman, damai, kondusif dan Prtisipatif sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama (Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualita).

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sebagai indikator kinerja daerah digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi ke-5 dalam RPJMD Sumatera Selatan ***“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”***.

Adapun Program dan Kegiatan Tahun 2027 tersebut secara rinci dapat dilihat pada Lampiran

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2027 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja selama tahun 2027 dan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Palembang, Februari 2026

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Drs. H. Atinarsa Jaya Surya
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 197106031991011002

LAMPIRAN

Tabel
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

Nomor	Kode	PMD 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	14,474,753,640			100%	16,655,704,368		
I.	8.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 dokumen	390,000,000			7 dokumen	348,000,000		
	8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palembang	3 Dokumen	155,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	3 Dokumen	186,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palembang	3 Laporan	100,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	3 Laporan	120,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palembang	1 Laporan	35,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Laporan	42,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.01.08	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah	Palembang	1 Data	100,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Data	120,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
II.	8.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah		100%	8,138,987,000			100%	9,766,784,400		
	8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	53 Orang/Bulan	7,663,987,000	Pendapatan Asli Daerah	-	44 Orang/Bulan	9,196,784,400	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palembang	1 Dokumen	400,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Dokumen	480,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Palembang	1 Dokumen	40,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Dokumen	48,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.02.05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palembang	1 Laporan	20,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Laporan	24,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Nomor	Kode	PMD 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Palembang	1 Laporan	15,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Laporan	18,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
III.	8.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	270,000,000			100%	324,000,000		
	8.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Palembang	1 Paket	200,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Paket	240,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Palembang	8 Orang	70,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	8 Orang	84,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
IV.	8.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1,230,000,000			100%	1,476,000,000		
	8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Palembang	1 Paket	100,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Paket	120,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Palembang	1 Paket	400,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Paket	480,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Palembang	1 Paket	100,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Paket	120,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Palembang	1 Dokumen	15,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Dokumen	18,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palembang	1 Laporan	600,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Laporan	720,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palembang	1 Dokumen	15,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Dokumen	18,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
V.	8.01.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		25 jenis	795,000,000			25 jenis	360,000,000		

Nomor	Kode	PMD 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8.01.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Palembang	11 Unit	495,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	11 Unit	594,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Palembang	36 Unit	300,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	82 Unit	360,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
VI.	8.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah		100%	1,850,766,640			100%	2,220,919,968		
	8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	1 Laporan	20,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Laporan	24,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palembang	1 Laporan	450,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Laporan	540,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palembang	1 Laporan	1,380,766,640	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Laporan	1,656,919,968	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
VII.	8.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik Daerah		100%	1,800,000,000			100%	2,160,000,000		
	8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Palembang	36 Unit	1,000,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	34 Unit	1,200,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palembang	1 Unit	300,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Unit	360,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palembang	80 Unit	500,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	25 Unit	600,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		70.00%	5,350,000,000			75%	6,420,000,000		
I.	8.01.02.1.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		6 Dokumen	5,350,000,000			6 Dokumen	6,420,000,000		

Nomor	Kode	PMD 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi Sumsel	250 Orang	250,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	250 Orang	300,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi Sumsel	100 Orang	250,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	100 Orang	300,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi Sumsel	1 Laporan	350,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Laporan	420,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Provinsi Sumsel	50 orang	4,500,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	45 Orang	5,400,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
3.	8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		60%	15,650,000,000			65%	18,780,000,000		
I.	8.01.03.1.01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Jumlah Dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik		7 Dokumen	15,650,000,000			7 Dokumen	18,780,000,000		

Nomor	Kode	PMD 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8.01.03.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Provinsi Sumsel	2 Dokumen	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	2 Dokumen	60,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Provinsi Sumsel	1 Dokumen	14,830,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Dokumen	17,796,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi Sumsel	100 Orang	120,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	150 Orang	144,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi Sumsel	550 Orang	500,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	550 Orang	600,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Nomor	Kode	PMD 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi Sumsel	1 Laporan	150,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Laporan	180,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4.	8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif		4,0%	1,075,000,000			4,5%	1,290,000,000		
I.	8.01.04.1.01	Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		3 Dokumen	1,075,000,000			3 Dokumen	1,290,000,000		
	8.01.04.1.01.01	Penyusunan program kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Provinsi Sumsel	1 Dokumen	250,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Dokumen	300,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.04.1.01.02	Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Provinsi Sumsel	1 Dokumen	200,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Dokumen	240,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Provinsi Sumsel	50 Orang	125,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	200 Orang	150,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Provinsi Sumsel	200 Orang	300,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	200 Orang	360,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Nomor	Kode	PMD 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Provinsi Sumsel	1 Laporan	200,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Laporan	240,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5.	8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan		25%	800,000,000			40%	960,000,000		
I.	8.01.05.1.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		3 Dokumen	800,000,000			3 Dokumen	960,000,000		
	8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Provinsi Sumsel	1 Dokumen	200,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Dokumen	240,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi Sumsel	500 Orang	200,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	600 Orang	240,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi Sumsel	300 Orang	200,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	600 Orang	240,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Nomor	Kode	PMD 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi Sumsel	1 Laporan	200,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Laporan	240,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
6.	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan		100%	200,000,000			100%	240,000,000		
I.	8.01.06.1.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		6 Dokumen	200,000,000			6 Dokumen	240,000,000		
	8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Provinsi Sumsel	1 Dokumen	200,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Dokumen	240,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Nomor	Kode	PMD 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023) Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Provinsi Sumsel	3 Dokumen	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Dokumen	300.000.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi Sumsel	100 Orang	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah	-	250 Orang	240.000.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi Sumsel	400 Orang	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah	-	100 Orang	360.000.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi Sumsel	1 Laporan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Laporan	120.000.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Provinsi Sumsel	1 Dokumen	700.000.000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Dokumen	840.000.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
JUMLAH						39.099.753.640				46.205.704.368		

Palembang, Februari 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan,

